

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus Desa Sejahtera Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango)

Joice Machmud¹⁾ Abdul Gafur Patuti²⁾

^{1,2)}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Indonesia 96212

Joicemachmud@umgo.ac.id, abdulgafurpatuti@gmail.com

Abstract

Poverty reduction is still a priority for the government, especially the village government. Various poverty reduction programs are still being carried out by the government, therefore the role of the village government is always a concern. This study aims to determine the role of the village government by taking a case study of the Sejahtera Village, Bulango Selatan District, Bone Bolango Regency. This study used a qualitative approach by using informants as sources to answer the research objectives through interviews.

The results of the study concluded that the role of the Government in poverty alleviation in the Prosperous Village has been implemented through various poverty reduction programs, namely the construction of latrines, construction of habitable houses and the provision of empowerment assistance in the agricultural sector. This role can be seen from four aspects or indicators, namely; aspects of the people who take part in social interactions, aspects of behavior that appear in interactions, aspects of people's position in behavior, and aspects of the relationship between people and contributing behaviors.

Keywords: Role, Village Government, Poverty

Abstrak

Penanggulangan kemiskinan hingga saat ini masih menjadi prioritas pemerintah, khususnya pemerintah desa. Berbagai program penanggulangan kemiskinan masih terus dijalankan oleh pemerintah, karena itu peran pemerintah desa selalu menjadi perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dengan mengambil studi kasus Desa Sejahtera Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan informan sebagai narasumber untuk menjawab tujuan penelitian melalui wawancara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Sejahtera telah diimplementasikan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, yaitu pembangunan sarana jambanisasi, pembangunan rumah layak huni serta pemberian bantuan pemberdayaan pada sektor pertanian. Peran tersebut dapat dilihat dari keempat aspek atau indikator yaitu; aspek orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, Aspek perilaku yang muncul dalam interaksi, Aspek kedudukan orang-orang dalam perilaku, dan Aspek kaitan antara orang dan perilakuyang mampu memberikan kontribusi.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, Kemiskinan

Received: 15 Desember 2022

Revised: 16 Desember 2022

Accepted: Desember 2022

PENDAHULUAN

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah

sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi

sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.

Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain:

1. Faktor Ekonomi: Kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain.
2. Faktor Budaya: Perceraian, kenakalan remaja, dan lain-lain.
3. Faktor Biologis: Penyakit menular, keracunan makanan, dan sebagainya.
4. Faktor Psikologis: penyakit syaraf, aliran sesat, dan sebagainya.

Berdasarkan empat kategori di atas, hal yang senantiasa menjadi fokus penanganan / penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah adalah tentang masalah sosial yang diakibatkan oleh faktor ekonomi, yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merabak atau bertambah banyak maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Banyak orang saat ini menerjemahkan kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kini kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas sehingga adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang

berada di tingkatan yang dibawah dan di atasnya.

Kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Penduduk miskin yang terdesak akan mencari lahan-lahan kritis atau lahan-lahan konservasi sebagai tempat pemukiman. Lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai fungsi konservasi tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya setelah dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Akibat berikutnya, maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan.

Selain itu, penduduk miskin pun akan sulit dalam hal mencari lapangan pekerjaan, penduduk miskin tanpa mata pencaharian akan memanfaatkan lingkungan sekitar, sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku. Karena desakan ekonomi, banyak penduduk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memasuki kawasan-kawasan yang sebenarnya dilindungi, apabila hal ini tidak dicegah dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama menyebabkan kawasan lindung akan berkurang bahkan hilang sama sekali, yang berdampak pada hilangnya fungsi lingkungan (sebagai pemberi jasa lingkungan). Selain itu menyebabkan tindakan kriminal yang menyebabkan permasalahan baru dalam hal masalah sosial.

Tetapi hal ini belum mampu mengangkat masyarakat marginal dan terpinggirkan dari garis kemiskinan. karena kemiskinan di sekitar kita telah menjadi bagian dari mentalitas masyarakat sehingga setiap individu akhirnya merasa nyaman dengan hidupnya meskipun bila dilihat secara kasat mata justru kehidupan mereka di pandang tidak layak, dapat pula kemiskinan itu terbentuk dengan eksploitasi kelas sosial di atasnya. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengentaskan masalah ini di perparah dengan di terbitkannya aturan yang melarang orang miskin seperti

misalnya pelarangan menggelandang, mengemis, mengamen dan pekerjaan orang miskin lainnya di tambah dengan aturan Pemberian sanksi bagi orang yang memberikan sumbangan kepada orang-orang yang menjalani profesi seperti yang di sebutkan diatas.

Peran pemerintah dari pusat hingga ke daerah-daerah bahkan desa telah banyak dilakukan. Bahkan permasalahan penanggulangan kemiskinan sudah sejak zaman orde baru hingga saat ini. Contoh yang bisa ditengahkan saat ini seperti; Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Sehat (KIP) ,Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan masih banyak lagi.

Tentunya berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan yang disebut di atas, telah sampai hingga ke desa-desa termasuk di Desa Sejahtera Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Dimana Desa Sejahtera merupakan bagian integral dari pemerintah pusat dan daerah. Hal ini karena desa ini memiliki penduduk yang termasuk kategori miskin cukup banyak. Jika berdasarkan data BPS penduduk miskin di desa Sejahtera mencapai 103 KK dari 338 KK yang ada. Dengan demikian pemerintah desa sebagai institusi yang menyelenggarakan pemerintahan melakukan berbagai upaya agar keluarga miskin memperoleh sentuhan untuk bisa keluar dari kategori KK miskin. Tentunya pemerintah Desa Sejahtera dalam memainkan perannya dalam penanggulangan kemiskinan tidak lepas dari tujuan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyalurkan berbagai program kemiskinan yang disebutkan di atas.

Namun dari pengamatan yang dilakukan selama ini, terutama untuk penyaluran program kemiskinan dari pemerintah pusat seperti PKH,BPNT,KIS,KIP dan sebagainya banyak menimbulkan masalah karena KK yang di usulkan dan layak menerima Program tersebut justru tidak menerima. Dan untuk

Program yang di laksanakan oleh pemerintah Desa Sejahtera Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dalam upaya pengentasan kemiskinan baik itu bantuan yang di terima pemerintah Desa sejahtera dari pemeritah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun yang di laksanakan oleh Pemerintah Desa secara suwakelola melalui pemanfaatan Anggaran Dana Desa (DD) yang di terima Oleh Pemerintah Desa setiap tahunnya , masih lebih banyak berorientase pada pelaksanaan untuk pembangunan fisik seperti Pembangunan Infrastruktur dasar pembuatan jambanisasi, Pengadaan Air bersih, Penerangan Jalan ,pembangunan rumah layak huni , bantuan dukungan untuk penyelenggaraan Pendidikan untuk TK dan paud serta dukungan utuk Program peanggulangan kesehatan di bandingkan untuk penguatan Perekonomian masyarakat Desa seperti Program Pemberdayaan Masyarakat untuk sektor pertanian, Peternakan dan Usaha Kecil Menegah (UKM) dan Pengembangan bakat dan Minat kaum milinial atau usia produktif untuk di arahkan menjadi mandiri , Selain permasalahan yang di atas , juga timbul masaalah di mana masyarakat yang telah menerima bantuan tidak mampu mengelolah bantuan yang diberikan walaupun pihak pemerintah desa telah melakukan pendampingan dan sosialisasi. Kondisi inilah yang sering menjadi hambatan di desa sehingga penanganan kemiskinan masih belum maksimal. Hal ini setelah dikonfirmasi dengan pihak pemerintah desa dan lembaga-lembaga teknis yang menangani program kemiskinan tersebut, ternyata pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya berdasarkan regulasi yang telah di atur melalui kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peranan pemerintahan Desa Sejahtera

Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango dalam penanggulangan kemiskinan.

- b. Untuk mengetahui Program yang telah di laksanakan oleh Pemerintah Desa Sejahtera kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango berinflimentasi pada penurunan kemiskinan

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta lapangan karena pendekatan ini peneliti berhadapan langsung dengan fokus masalah yang diteliti serta mudah mendeskripsikannya berdasarkan temuan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun alasan yang mendorong penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif ini karena menurut Sutopo dan Arief (2010), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Oleh sebab itu permasalahan yang akan diteliti sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

b. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pelaku utama dalam pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. Sebagai instrumen utama, peneliti berperan sebagai pengamat penuh, dengan mengadakan pengamatan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya hal yang terjadi di lapangan.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan)

maupun dari suatu instansi maupun lembaga yang menangani permasalahan kemiskinan di daerah. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari : Kepala Desa (key informan), Ketua BPD, Ketua LPM, Aparat Desa, Wakil Masyarakat.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

d. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik: Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

e. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Analisis penyebab kemiskinan ini menggunakan pendekatan kombinasi kultural dan struktural. Untuk pendekatan kultural digunakan tingkat analisis masyarakat, yakni dengan mengkaji

integrasi penduduk miskin dengan lembaga lokal masyarakat. Sedang untuk pendekatan struktural dilihat dari proporsionalitas atau keberpihakan terhadap penduduk miskin terkait kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan selama ini.

Dalam perkembangannya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah tentang permasalahan kemiskinan lebih diarahkan pada tingkat paling bawah dalam hal ini pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang sekaligus merupakan kolaborasi kebijakan baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dalam penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Sejahtera bahwa untuk program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pada beberapa tahun terakhir ini. Dimana berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut merupakan kolaborasi antar pemerintah pusat hingga pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan Program Penanggulangan kemiskinan di Pemerintahan Desa Sejahtera kecamatan Bulango selatan, berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat Desa yang disesuaikan dengan regulasi yakni Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, terdiri dari 14 Kriteria Kemiskinan. adapun 14 Kriteria Kemiskinan Menurut KEMENSOS RI, meliputi :

1. Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Kurang dari 8 M2 per Orang.
2. Jenis Lantai Tempat Tinggal Terbuat dari Tanah/Bambu/Kayu Murah.
3. Jenis Dinding Tempat Tinggal dari Bambu/Rumbia/Kayu Berkualitas Rendah/Tembok Tanpa Diplester.
4. Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar/Bersama-sama dengan Rumah Tangga Lain.
5. Sumber Penerangan Rumah Tangga tidak Menggunakan Listrik.

6. Sumber Air Minum berasal dari Sumur/Mata Air tidak terlindung/Sungai/Air Hujan.
7. Bahan Bakar untuk Memasak sehari-hari adalah Kayu Bakar/Arang/Minyak Tanah.
8. Hanya Mengonsumsi Daging/Susu/Ayam dalam satu kali Seminggu.
9. Hanya Membeli Satu Stel Pakaian Baru dalam Setahun.
10. Hanya Sanggup Makan Sebanyak Satu/Dua Kali dalam Sehari.
11. Tidak Sanggup Membayar Biaya Pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.
12. Sumber Penghasilan Kepala Rumah Tangga adalah : Petani dengan Luas Lahan 500 M2, Buruh Tani, Nelayan, Buruh Bangunan, Buruh Perkebunan dan atau Pekerjaan Lainnya dengan Pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per Bulan.
13. Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga : Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/Tamat SD.
14. Tidak Memiliki Tabungan/Barang yang Mudah dijual dengan Minimal Rp. 500.000,- seperti Sepeda Motor Kredit/Non Kredit, Emas, Ternak, Kapal Motor, atau Barang Modal Lainnya.

Dan untuk peran pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan yang murni kebijakan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Sejahtera. Dimana program pengentasan kemiskinan selain menyesuaikan dengan 14 kriteria kemiskinan (data terpadu kesejahteraan sosial) Pemerintah Desa sejahtera meyelaraskan dengan Pengkajian Dokumen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM-Des) atas penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Desa Sejahtera tahun 2018 – 2024 yang di sinkronkan dengan regulasi lainnya seperti peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai acuan perencanaan Pemanfaatan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa sebagai pedoman

Pelaksanaan Penganggaran program yang di danai oleh Dana Desa dan selajutnya menjadi plat from (rencana kerja) untuk penyusunan Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDES) setiap tahun, Rencana kerja Pembangunan Desa secara de jure wajib diputuskan secara paripurna dalam musyawarah Desa dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan masukan program – program yang mendesak yang di sampaikan oleh Pemerintah Kabupaten maupun pemerintah pusat untuk di aktualisasikan dalam program di Desa, pada prinsipnya upaya Pemeritahan di Desa Sejahtera Kecamatan Bulango selatan dalam peranya untuk menaggulangi kemsikinan sudah sangat maksimal .

Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa Sejahtera dalam penanggulungan kemiskinan, maka penelitian menggunakan beberapa indikator, sekaligus menjadi pertanyaan dalam melakukan wawancara kepada berbagai informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup tentang permasalahan yang diteliti. Adapun indikator tersebut adalah 1). Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, 2). Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, 3). Kedudukan orang- orang dalam perilaku, 4). Kaitan antara orang dan perilaku. Biddle dan Thomas (Edy Suhardono,2004)

a. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dalam menjalankan program penanggulungan kemiskinan

Dalam menjalankan perannya dalam penanggulungan kemiskinan Pemerintah Desa Sejahtera melibatkan berbagai komponen masyarakat, hal ini dengan maksud agar pencapaian saran program benar-benar terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa dimulai dengan pendataan kembali kk miskin yang menjadi sasaran bantuan,

melaksanakan verifikasi data, dan mentapkan penerima bantuan.

Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Sejahtera:

“....peran aparat desa selama ini sudah optimal. Terutama untuk merealisasikan program bantuan kepada masyarakat. Kami sebagai pemerintah desa senantiasa melibatkan berbagai pihak baik BPD, LPM, aparat desa serta masyarakat sendiri dalam kaitan dengan pendataan KK miskin. Hal ini kami lakukan agar tidak ada masyarakat yang terlewati dalam pemberian bantuan. Demikian pula untuk program-program fisik seperti pembauatan jamban di rumah-rumah masyarakat penerima bantuan. Serta bantuan-bantuan untuk UMKM.”

(Wawancara 27 Juli 2020)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa Sejahtera dalam menjalankan perannya melibatkan masyarakat dalam menjalankan program-program penanggulungan kemiskinan.

Demikian juga yang dikemukakan oleh Ketua BPD desa Sejahtera:

“.....ia benar, dalam menjalankan program-program bantuan dalam rangka menekan angka kemiskinan dan pemberian bantuan pada keluarga miskin, pemerintah desa tidak bekerja sendiri, keterlibatan masyarakat khususnya kami dari BPD selalu berkolaborasi dengan pemerintah desa, terutama dalam kaitannya dengan pendataan KK miskin”.

Berdasarkan informasi dari empat informan di atas, maka dapat dikatakan bahwa peran pemerintah Desa Sejahtera dalam penanggulungan kemiskinan ditinjau dari aspek interaksi sosial dengan elemen masyarakat telah berjalan dengan baik. Hal

ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik.

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi aparat desa selama terlibat dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan penanganan masyarakat miskin

Perilaku yang muncul dalam interaksi yang dimaksud adalah bagaimana seseorang setelah mengambil perannya, maka akan terlihat apa yang dilakukannya. Artinya seseorang harus ada aktivitas dalam kegiatan atau aktivitas yang diikutinya. Yang dimaksud dari pernyataan ini adalah interaksi melalui peran pemerintah desa dalam menjalankan program pemerintah dalam penanganan kemiskinan di desa Sejahtera.

Seperti yang dikemukakan oleh kepala desa sebagai berikut:

"....Saya memantau aktivitas setiap aparat desa, karena setiap tahapan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilapangan sudah seharusnya pemerintah desa melibatkan berbagai stakeholder yang ada di desa. Dengan demikian akan terjalin interaksi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat khususnya dalam rangka penyaluran bantuan-bantuan kepada KK miskin yang ada di desa ini".

(Wawancara 2 Agustus 2020)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua BPD Desa Sejahtera sebagai berikut:

"....Memang benar, apa yang dikatakan oleh kepala desa. Behubung saya juga selalu terlibat dalam setiap tahapan pembahasan tentang bantuan kepada masyarakat, maka saya tau persis keaktifan aparat desa. Mereka begitu memahami bagaimana koordinasi yang akan dilakukan dalam pendataan KK maupun

dalam hal penyaluran bantuan. Walaupun dalam beberapa program bantuan KK miskin ada yang disalurkan melalui rekening masyarakat. Dan disini peran aparat desa memfasilitasi masyarakat agar urusannya jadi lancar"

(Wawancara 2 Agustus 2020)

Dari tiga pernyataan di atas dapat diinterpretasikan bahwa aspek perilaku yang muncul dalam kaitan peran aparat desa, nyata dan dapat terlihat hasilnya. Namun masih perlu selalu evaluasi atas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan khususnya Program yang bersumber dari Program pusat.

c. Bagaimana Kedudukan orang-orang dalam perilaku pelaksanaan program kemiskinan selama ini?

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama.

Artinya bahwa setiap orang yang mengambil peran akan terlihat mampu menyatu dengan orang lain dalam suatu kelompok. Setelah hal ini dikonfirmasi kepada kepala desa tentang kedudukan aparat desa setelah menyatu dengan dengan baik masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat, maka berikut petikan pernyataannya:

"... Saya lihat aparat desa biasa saja mereka dalam bergabung dengan kelompok atau apalah namanya, mereka tidak merasa sebagai aparat desa yang harus dihargai atau tidak mengakrabkan diri dengan masyarakat lain. Yang sebenarnya mereka dalam melaksanakan semua program yang berkaitan dengan kemiskinan aparat desa bekerja apa adanya sesuai tugas yang mereka emban yaitu melakukan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program kemiskinan.

(Wawancara, 4 Agustus 2020)

Demikian pula dengan Ketua LPM, menyatakan:

“...aparatus desa sejahtera yang terlibat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan selama ini sangat bagus dan cukup akomodatif, mereka tidak kaku, bisa langsung menyatu dengan kelompok, atau dengan kami sebagai bagian dari organisasi desa yang memperlancar tugas-tugas dan peran desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak ada masalah pak”

(Wawancara, 4 Agustus 2020)

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran aparat desa ditinjau dari aspek kedudukan dan perilaku perannya, sudah cukup baik. Aparatus desa sejahtera mampu menyatu dan membaur dengan masyarakat di desa sebagai pelayanan mereka tanpa memandang status dan kedudukan di masyarakat.

d. Hubungan komunikasi aparat desa dengan masyarakat terkait dengan program penanggulangan kemiskinan

Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan. Jika konsensus ditandai oleh kesamaan pandangan, maka ada pula kaitan antara perilaku- perilaku yang ditandai oleh tidak adanya persamaan pandangan. Keadaan ini disebut disensus (dissensus).

Artinya bahwa peran aparat desa disaat dalam menjalankan fungsinya terdapat perbedaan pendapat atau pandangan, maka aparat desa tidak mempertahankan pendapatnya justru sebaliknya mereka sadar akan tujuan sebagai pelayanan masyarakat dan untuk semua yang dilakukan untuk semata-mata

kepentingan masyarakat. Hal ini diperjelas melalui wawancara dengan Kaur pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut:

“....saya juga termasuk tim yang selalu turun ke lapangan mengunjungi masyarakat atau KK miskin yang menjadi target program. Kami sebagai aparat desa sadar jika dimasyarakat sering ditemukan perbedaan pendapat dalam penyaluran bantuan maupun penetapan lokasi pembangunan fisik untuk kepentingan air bersih misalnya. Jadi memang tidaklah mudah jika berhadapan dengan masyarakat. Tapi itulah tantangan yang kami hadapi.”

(Wawancara, 6 Agustus 2020)

Sedangkan menurut Ketua BPD, dalam hal ini dikatakan:

“....saya juga memaklumi peran aparat desa, kadang mereka menjadi narasumber, sehingga informasi yang mereka berikan sangat penting bahkan harus direspon. Hanya saja kadang ada saja pandangan masyarakat yang pendapatnya bisa berbeda dengan pandangan aparat desa tersebut. Tapi itu biasa saja. Akhirnya bisa dicari jalan keluarnya ketika terjadi perbedaan pendapat”

(Wawancara, 6 Agustus 2020)

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka peran aparat desa ditinjau dari aspek kaitan orang dan perilaku, tidak menimbulkan masalah terutama dalam perbedaan pendapat. Aparatus desa dengan peran mereka mampu menyesuaikan dan memecahkan perbedaan pendapat dan permasalahan di lapangan. Sehingga dengan demikian dilihat dari indikator ini peran pemerintah desa melalui hubungan komunikasi aparat desa dengan masyarakat terkait dengan program penanggulangan kemiskinan cukup baik.

Pembahasan

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawa oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (*role performance*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian sebagai bahasan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui Peranan pemerintahan Desa Sejahtera Kecamatan Bulango Selatan dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan;

Dari pengertian Pemerintahan Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Aparat Desa dan Pemerintahan Desa dalam hal ini Pemerintah Desa dengan Unsur badan permusyawaratan Desa dan lembaga – lembaga Desa lainnya, pada pelaksanaan menjalankan fungsi dalam penanggulangan kemiskinan yang berada di Desa sejahtera Kecamatan Bulango selatan sebagai unsur pemerintahan Desa telah melaksanakan kolaborasi dalam merumuskan program – program yang akan dijalankan dalam Penanggulangan kemiskinan tersebut , berdasarkan pada hasil penelitian dengan metode wawancara , sehingga mencapai tujuan penelitian untuk mengetahui peranan Pemerintahan Desa Sejahtera dalam penanggulangan kemiskinan sudah dilaksanakan secara efisien dan efektif , semua stakeholder di Desa sejahtera Kecamatan Bulango selatan telah memainkan perannya dalam merumuskan program – program Penanggulangan kemiskinan di Desa Sejahtera secara transparansi dengan melibatkan masyarakat dalam penggalan aspirasi sehingga menghasilkan program – program Penanggulangan Kemiskinan yang akuntabel dan berafiliasi pada potensi

masaalah , sketsa desa dan Peraturan – peraturan yang berkesesuaian dengan program yang telah dirumuskan secara paripurna berkaitan dengan hal tersebut didasarkan oleh peneliti pada:

- a. Tersedianya data individual secara Elektronik untuk masyarakat Desa Sejahtera yang menjadi sasaran Program dalam penanggulangan kemiskinan yang terangkum pada Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) berdasarkan 14 kriteria masyarakat yang termasuk fakir miskin dan orang tidak mampu versi Kemensos RI.
 - b. Tertuangnya Program – program Penanggulangan Kemiskinan di Desa sejahtera dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) , Rencana Kerja pembangunan Desa (RKPDes) sebagai regulasi untuk pelaksanaan program – program di desa setiap tahun yang aksentuasinya dari program – program di dokumen – dokumen tersebut dibahas secara komprehensif dan kolektif oleh lembaga pemerintahan Desa.
 - c. Terlibatnya unsur lembaga – lembaga di Desa Sejahtera sesuai dengan fungsi dan perannya baik dari kegiatan perencanaan , pelaksanaan maupun pengawasan program – program yang dilaksanakan .
 - d. Tersedianya dokumen sketsa pemetaan kondisi Desa sejahtera kedepan untuk dijadikan pengembangan potensi perekonomian desa seperti lokasi untuk dijadikan pasar Desa;
- ### 2. Untuk mengetahui apakah program – program yang sudah dilaksanakan berdampak signifikan pada penurunan kemiskinan;

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah kami laksanakan dengan menggunakan metode wawancara, pencermatan dokumen yang tersedia dan pengamatan langsung di lapangan , bahwa Pemerintah Desa sejahtera selang

beberapa tahun terakhir ini (2016-2019) telah melaksanakan program – program dalam upaya penurunan kemiskinan, untuk program yang telah di laksanakan oleh Pemerintah Desa sejahtera kecamatan bulango selatan berkolaborasi dengan Program – program dari pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan, Untuk program – program yang telah di laksanakan terutama yang di jalankan langsung oleh pemerintah Desa Sejahtera yang pelaksanaanya bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) sebagian besar anggaranya teralokasi untuk Pembangunan Infrastruktur dasar seperti Pembangunan Jambanisasi,Rumah layak Huni, Pengadan air bersih dan lain sebagainya di bandingkan dengan pengalokasian anggaran untuk program peberdayaaan masyarakat yang di harapkan untuk penguatan perekonomian masyarakat seperti pemberian bantuan pupuk dan bibit bagi petani ,pengadaan ternak sapi guliran maupun bantuan untuk pelaku usaha kecil menengah,dan sesuai dengan hasil penelitian yang telah kami laksanakan berdasarkan pada pengambilan data langsung dari pemerintah Desa , wawancara sekaligus pengamatan langsung terhadap pemanfaat yang sudah menerima program tersebut , adapun program yang telah di laksanakan oleh pemerintah Desa sejahtera sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan untuk anak - anak usia Dini (2 - 5 Tahun) Pemeritah Desa sejahtera telah melaksanakan program berupa Penberian bantuan untuk penunjang peningkatan mutu pendidikan seperti Rehab bangunan sekolah ,penyediaan maubiler ,sarana bermain anak dan alat peraga berbasis elektronik serta pemberian honor bagi tenaga dan pengelola paud di TK/Paud sebagai bentuk perwujudan usaha pemeritah Desa dalam menyiapkan Generasi cerdas semenjak usia Dini.
- b. Bidang Peningkatan sumber daya

manusia Pemerintah Desa sejahtera telah melaksanakan program yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia baik di tinjau dari aspek kerohanian berupa pemberian Honor bagi guru ngaji dan imam mesjid , dan dari aspek peningkatan perekonomian masyarakat yang berusia produktif (usia 20 – 45 Tahun) di laksanakan program pelatihan menjahit bagi ibu rumah tangga serta untuk peningkatan sumber daya manusia bagi Aparatur Desa sejahtera berupa pengalokasikan anggaran untuk kuliah bagi aparat Desa yang masih berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLA) .

- c. Bidang kesehatan Pemeritah Desa Sejahtera telah melaksanakan program berupa Pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan anak – anak balita serta penyediaan peralatan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di posyandu (pos pelayanan terpadu) , posbindu (pos binaan terpadu) dan pemberian honor bagi kader kesehatan Desa serta program pelatihan pembuatan makanan pendamping Asi bagi ibu – ibu hamil maupun yang mempunyai anak balita ber basis bahan lokal yang tumbuh dan mudah di diperoleh di di lingkungan Desa Sejahtera .
- d. Bidang kambtibmas (kenakalan remaja) ,salah faktor yang memicu terjadinya kenakalan remaja adalah lingkungan Desa yang gelap pada malam hari sehingga dari pemeritah Desa sejahtera dalam mengantisifasi hal ini mebuat program penerangan jalan di tempat – tempat yang di anggap rawan kriminilitas .
- e. Pembangunan Infrakstruktur dasar berupa pembangunan pembangunan Jambanisasi,Rumah layak huni ,dan pengadaan air bersih bagi masyarakat miskin ,sampai dengan tahun 2019 anggaran yang telah di serap untuk pelaksanaan pembangunan

infrastruktur dasar ini sejumlah Rp 871.298.516.-

- f. Bidang pemberdayaan masyarakat pemeritah Desa sejahtera telah melaksanakan untuk penguatan pemberdayaan masyarakat berupa pemberian bantuan untuk sektor pertanian dan peternakan dan masyarakat yang berprofesi pada usaha Kecil dan menengah.

Dengan demikian bahwa tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengambil lokus dan studi kasus di desa Sejahtera Kecamatan Bulango Selatan dalam pelaksanaan peranan pemeritahan hal ini telah dijalankan dengan sangat baik tetapi untuk program – program yang telah di laksanakan seperti terurai di atas ,belum secara maksimal untuk menurunkan angka kemiskinan, hal ini didasarkan oleh peneliti pada :

- a. Untuk program – program yang telah di laksanakan oleh Pemeritah Desa sejahtera masih bersifat umum yang substansinya masih dalam tataran penaggulangan potensi persoalan sosial sedangkan untuk Penaggulangan Kemiskinan secara spesifik yang berorientase untuk mengarahkan KK miskin menjadi menjadi KK yang mandiri melalui program penumbuhan perekonomian masyarakat miskin belum di laksanakan secara kontinyu dan porsi anggarannya yang masih minim di bandingkan dengan porsi anggaran untuk pembangunan infrastruk dasar.
- b. Program Pemberdayaan yang telah di laksanakan seperti pemberian bantuan untuk sektor pertanian ,peternakan dan usaha kecil menengah masih di nilai sebagian besar KK miskin sebagai dana hibah yang akan di kuncurkan oleh pemeritah Desa setiap tahun sehingga belum dapat merubah mindset KK miskin bahwa bantuan tersebut di menjadi modal untuk usaha sehingga

dapat meningkatkan perekonomian keluarga.

- c. Program Pelatihan menjahit bagi ibu rumah tangga tidak di barengi dengan penyiapan tempat usaha maupun pemberian peralatan menjahit bagi yang sudah selesai melaksanakan pelatihan tersebut sehingga harapan dari pelaksanaan menjadikan ibu rumah tangga mempunyai penghasilan baru bagi keluarga tidak dapat di realisasikan
- d. Masyarakat penerima Program PKH,BPNT,BLT,KIS,KIP ada yang tidak tepat sasaran kerena dari pengamatan kami di lapangan ada penerima program tersebut tidak layak lagi sebagai KK Miskin tetapi tidak mau keluar dari program tersebut untuk di gantikan dengan masyarakat yang sesuai kriteria miskin.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran Pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Sejahtera telah diimplementasikan dengan baik yakni semua stakeholder di Desa sejahtera Kecamatan Bulango selatan telah memainkan perannya dalam merumuskan program – program Penaggulangan kemiskinan di Desa Sejahtera secara transparansi, efisien dan efektif dengan melibatkan masyarakat dalam penggalian aspirasi sehingga menghasilkan program–program Penaggulangan Kemiskinan yang akuntabel dan berafiliasi pada potensi masalah melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan. Hal dapat dilihat dari keempat aspek atau indikator yaitu; (1) aspek orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, (2) Aspek perilaku yang muncul dalam interaksi, (3) Aspek kedudukan orang- orang dalam perilaku, dan (4) Aspek kaitan antara

orang dan perilaku yang mampu memberikan kontribusi.

- b. program – program penanggulangan kemiskinan yang telah di laksanakan oleh pemeritah Desa sejahtera belum secara maksimal untuk menurunkan secara signifikan dalam penurunan angka kemiskinan di desa sejahtera kecamatan bulango selatan dan substansinya masih dalam tataran penanggulangan secara umum untuk potensi persoalan sosial , dan belum mengarah kearah yang lebih spesifik untuk menciptakan KK miskin menjadi KK yang mandiri dari prespektif perekonomian serta belum di laksanakan secara kontinyu .
- c. Program Penanggulangan kemiskinan yang telah di laksanakan oleh Pemeritah Desa sejahtera terutama untuk bidang pemberdayaaan belum dapat merubah mindset masyarakat penerima program untuk menjadikan program tersebut sebagai usaha dalam megembangan perekonomian mereka tetapi masih bersifat konsumtif.

Saran

Adpun saran yang dapat disampaikan melalui kesempatan ini adalah sebagai berikut:

1. Program kemiskinan harus dikelola tidak hanya dari aspek anggarannya, melainkan juga perlu dari aspek capaiannya, karena itu diperlukan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan sehingga program pemberdayaan mendapatkan porsi yang lebih sehingga dapat di laksanakan secara kontinya.
2. Pemerintah Desa Sejahtera perlu memfalidasi penyebab-penyebab kemiskinan, karena seharusnya intervensi kebijakan program pada permasalahan penyebab tersebut.

Pemerintah Desa sejahtera perlu membuat regulasi terutama dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat untuk merubah midset masyarakat dari

konsumtif mejadi mandiri dalam bidang penguatan perekonomiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. Judul : Terampil Mengolah Parwato. 2001. Penanggulangan Kemiskinan Departemen Permukiman dan Pembangunan Sarana. Jakarta : Wilaya.
- Chambers, Robert.1995. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang.Yogyakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial)
- Didin Immoyo, 2017, Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo). Skripsi
- Finer, Samual Edward. 2006. Comparative Government. terjemahan. Ghalia Indonesia. Bandung.
- HAW. Widjaja. 2003. Otonomi Desa. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hikmat, R. Harry, 2001, Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.